

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Basyir, 1992, *Pokok Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta.

A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali Yafie, 1997, *Wacana Baru Fiqh Sosial*, Mizan, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Edisi Revisi, Cet. 1, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1991, *Korupsi di Indonesia; Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Baharudin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi*, PT. Aditya Bakti, Cet. 1, Bandung.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Cet. 1, Jakarta.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Cet. 1, Jakarta.

H. Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, (ed.), 2006, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Ibham Gunawan, 1999, *Dasar-Dasar Korupsi di Indonesia: Tinjauan Ver...*

Created with

 **nitro**PDF professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

- Jimly Asshidiqie, 1995, *Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung.
- Juniadi Soewarto, 1995, *Korupsi: Pola Kegiatan Dan Penindakan Serta Pengawasan Dalam Penanggulangannya*, Restu Agung, Jakarta.
- K.H. Masdar. F.Mas'udi, dkk, 2006 *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Anti Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Cet 2, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi; Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Halia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang No.31 tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, A., 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Noeng Muhadjir, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2000, *Tindak Pidana Korupsi, Moralitas Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas

O.C. Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Edisi I, Alumni, Bandung.

Singgih, 2002, *Dunia Pun Memerangi Korupsi; Beberapa Catatan Dari International Anti Corruption Conferences I-X Dan Dokumen PBB Tentang Pemberantasan Korupsi*, Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Tangerang.

Syed Hussein Alatas, 1987, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1987, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelasan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dicabut dan digantikan oleh Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### **Jurnal Hukum**

M. Abdul Kholiq, 2000, *Studi Komparasi Tentang Konsep Asas Legalitas (Beberapa Catatan Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)*, Jurnal Hukum Keadilan Vol III, No. 3, FH UII Yogyakarta.

### Artikel Internet

- Abdul Rahman Saleh, dimuat tahun 2005, "*Penegakan hukum Sebagai Komponen Integral Pembangunan Nasional*", diakses pada tanggal 18 Mei 2007 pada jam 21.56 WIB, [http://www.komisihukum.go.id/newsletter.php?\\_act=detil&id=116](http://www.komisihukum.go.id/newsletter.php?_act=detil&id=116).
- Bambang Catur I, dimuat tahun 2004, "*Kasus Korupsi JEC*", diakses pada tanggal 2007 pada jam 20.30 WIB, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0412/15/ked09.htm>.
- Jimly Asshiddiqie, dimuat tahun 2006, "*Benahi Lembaga Penyidik*", diakses pada tanggal 20 Mei 2007 pada jam 20.00 WIB, <http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=2035>.
- M. Ali Zaidan, dimuat tahun 2003, "*Perang Terhadap Korupsi dan Terorisme*", diakses pada tanggal 20 April 2007 pada jam 19.55 WIB <http://www.indonesia.com/sripo/2003/03/06/0603op.htm>.
- Muladi, dimuat tahun 2005, "*Korupsi Bukan Lagi Masalah Negara Per Negara*", diakses pada tanggal 20 Mei 2007 pada jam 21.28 WIB [http://www.depkominfo.go.id/index.php?action=view&pid=news\\_aceh&id=559](http://www.depkominfo.go.id/index.php?action=view&pid=news_aceh&id=559).
- Masyarakat Transparansi Indonesia, dimuat tahun 2001, "*Sebab-sebab Korupsi*", diakses pada tanggal 17 Mei 2007 pada jam 19.30 WIB <http://www.transparansi.or.id/index.php?pilih=lihatberita&id=150>.
- Masyarakat Transparansi Indonesia, dimuat tahun 2005, "*Analisa Peraturan Perundang-undangan dan Lembaga Pemberantasan Korupsi*", diakses pada tanggal 18 Mei 2007 pada jam 22.30 WIB <http://www.transparansi.or.id/index.php?pilih=lihatberita&id=150>.
- Masyarakat Transparansi Indonesia, dimuat pada tahun 2005, "*Resume Berita Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi Minggu ke II Desember 2005*", diakses pada tanggal 28 April 2007 pada jam 12.27 WIB, <http://www.transparansi.or.id/berita/berita-desember2005/anti-korupsi/kpk2.html>.
- RM. Arrobi Rahmat Zoneijdhi, dimuat pada tahun 2002, "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Sistem Pembuktian Terbalik*", diakses pada tanggal 4 Oktober 2007 pada jam 22.30 WIB, <http://www.digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptum-gdl-s1-2002-rm-5884-korupsi&q=nasional>

Transparency International, dimuat pada tahun 2007, "*Survei Transpranscy International*", diakses pada tanggal 4 Oktober 2007 pada jam 21.30 WIB, [http://www.jawapos.Co.id/index.php?act=detail\\_c&id=305503](http://www.jawapos.Co.id/index.php?act=detail_c&id=305503).

Hukum Online, dimuat tahun 2007, "*Membuat Garis Wewenang Penyidikan dan Penuntutan*", diakses pada tanggal 6 November 2007 pada jam 18.30, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=14598&cl=Resensi>.

Singgih, dimuat tahun 2000, "*Beberapa Kesimpulan dari Konferensi Internasional Anti Korupsi*," diakses pada tanggal 14 November 2007 pada jam 11.40 WIB, <http://www.korupsi.com>.